KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dorong Bentuk Tim Investigasi Terorisme
Tanggal : Jumat, 18 Mei 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Dorong Bentuk Tim Investigasi Terorisme

JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan akan mempertimbangkan masukan dari Persaudaraan Alumni 212 untuk membentuk panitia khusus (Pansus) DPR RI untuk menyelidiki kasus kerusuhan di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob dan sejumlah aksi terorisme lainnya. Namun, hal ini ternyata masih menuai pendapat pro-kontra di kalangan DPR.

Bagi anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil, daripada membentuk Pansus, lebih baik dibentuk tim investigasi yang menghimpun berbagai akademisi dan pakar terorisme. "Kalau pansus saya pikir terlalu lama pembahasannya. Bentuk saja tim investigasi. Anggotanya terdiri atas DPR yang bersinergi dengan dan profesional orang luar, di bawah komando Pak Fadli selaku pimpinan DPR yang membidangi Polhukam," kata Nasir kepada INDOPOS di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/5).

Menurutnya, tim investigasi nantinya bisa menyelidiki berbagai hal kenapa kerusuhan di Mako Brimob bisa terjadi hingga apakah ada keterkaitannya dengan peritiwa Bom bunuh diri di Surabaya, termasuk kinerja kepolisian. "Tim investigasi ini bukan tidak percaya kepada aparat keamanan, tapi untuk menguatkan akuntabilitas mereka agar lebih baik dalam penanganannya. Tentu saja tidak semua informasi akan disampaikan ke publik, termasuk hal-hal terkait laporan inteleijen yang tidak bisa dikonsumsi. Kecuali sesama intelijen," ucapnya.

Politisi PKS ini menjelaskan, tujuan adanya tim investigasi ini bisa saja dapat memberikan rekomendasi, baik kepada presiden ataupun aparat kepolisian. "Intinya ini salah satu bentuk pengawasan DPR terhadap mitra kerjanya. Temuan apapaun yang ada di lapangan baik dalam bentuk prediksi, hipotesa, dan asumsi yang terbangun dari tim ini bisa menjadi acuan agar penanganan terorisme bisa lebih baik lagi," ucapnya.

Apakah hal ini tidak harus menunggu pengesahan RUU Terorisme yang saat ini masih menjadi perdebatan antara DPR dengan pemerintah? "Ya saya kira bisa berjalan beriringan saja. Tim investigasi dibentuk sambil menunggu pengesahan RUU Terorisme. Atau mungkin hasil temuan dari tim ini bisa menjadi rujukan tambahan di RUU Terorisme," tandasnya.



CHARLIE LOPULUA/INDOPOS

TEMUI PA 212-Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima kunjungan dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 di ruang rapat pimpinan, Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5) lalu.

Namun apa yang diutarakan oleh Fadli Zon dan Nasir Jamil itu tidak diamini oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfahri Harahap. Politisi Partai Amanat Nasional menyatakan bahwa lebih baik DPR dan pemerintah berkonsentrasi menyegerakan pengesahan RUU Terorisme. "Saya tidak setuju ada pansus ataupun tim investigasi. Persoalan terorisme bisa dicegah dengan segera mengesahkan RUU Terorisme," ujarnya.

Dirinya pun meminta agar pemerintah segera membahas RUU tersebut. "Selama ini kan yang menghambat pembahasan RUU Terorisme adalah pemerintah. Jadi kalau mau cepat ya segera tim panja RUU Terorisme pemerintah segera bahas bersa-

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

ma DPR," ujarnya menambahkan.

Senada juga diutarakan oleh mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Kepada INDOPOS, dirinya menjelaskan bahwa persoalan terorisme sudah ada sejak lama. Jadi tidak tepat baru sekarang dibentuk tim inevstigasi ataupun Pansus. "Kalau mau bentuk tim kenapa baru sekarang. Kenapa nggak dari dulu sejak ada terorisme di negeri ini," ujarnya.

Sama halnya dengan Mulfahri, Pigai juga mengusulkan yang paling mendesak adalah segera disahkannya RUU Terorisme. "UU-nya saja dulu disahkan. Dengan adanya revisi UU No 15/2003 ini memberi kekuatan otoritas yang terukur dalam memberantas terorisme tanpa menyentuh persoalan kemaunsiaan dalam penegakan bagi aparat penegak hukum," ujarnya.

Karena kalau berdasar teori hak asasi manusia, lanjut Pigai, tindakan penegaakan hukum hanya diperbolehkan jika didukung regulasi. "Kalau kepolisian berdasarkan koridor UU maka itu tidak melanggar HAM," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR bertemu perwakilan dari PA 212. Dari pertemuan itu DPR diusulkan agar membentuk Pansus penyelidikan serangkaian tragedi terorisme yang menyebabkan banyak korban jiwa baik dari kalangan sipil maupun aparat kepolisian. "Mendesak DPR RI untuk segera membentuk Pansus terkait Tragedi Kerusuhan di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada Tanggal 8 Mei lalu dan lainnya," kata Ketua PA 212 Slamet Maarif di sela-sela pertemuan dengan Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Rabu (16/5).

Selain itu, mereka meminta DPR untuk mendesak Kapolri untuk menjelaskan aksi-aksi teror tersebut. Sebab ditakutkan akan berdampak negatif untuk agama Islam. "Kami meminta DPR untuk secepatnya memanggil Kapolri untuk menjelaskan aksi-aksi terorisme yang berdampak negatif kepada Islam," ucapnya.

Fadli Zon turut membenarkan adanya masukan dari PA 212 terkait dorongan pembentukan Pansus Terorisme. "Ada usulan-usulan lain seperti adanya desakan untuk membentuk pansus terkait peristiwa yang terjadi di Mako Brimob. Lalu ada juga aspirasi lain seperti masalah tenaga kerja asing, bahaya komunisme, dan lain-lain," ucap Fadli. **(dil)**